

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Budaya politik yang berkembang di Indonesia belakangan ini pada akhirnya melahirkan tradisi kekuasaan yang tidak sehat. Demokrasi tidak dikendalikan oleh aktor untuk memperjuangkan aspirasi konstituen masing-masing, tetapi hanya sebatas ajang memperkaya diri dan menaikkan derajat seseorang, sehingga kekuasaan menjadi alat mencari gengsi sosial politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya.

Demokrasi semata dimaknai sebagai sebuah metode kelembagaan, maka proses-proses demokrasi diukur dalam parameter “bagaimana suara didapatkan”. Artinya, demokrasi adalah proses bagaimana untuk mendapatkan legitimasi publik, dalam hal ini, suara rakyat dalam pemilu. Jangan heran jika pemilu, pilpres, dan pilkada dianggap sebagai pencapaian brilian dari upaya demokratisasi (Sharma, 2004: 76).

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang adil dan periodik, pertanggungjawaban negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Arifin, 2006: 15).

Pada negara demokrasi pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari yang diperintah. Penyelenggaraan negara, khususnya pimpinan eksekutif dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Legitimasi pemerintahan terutama bukan pada keahlian dan kepintaran mereka tetapi pada persetujuan dan pilihan rakyat, dalam negara demokrasi, rakyat paling berhak dan paling mengetahui tentang siapa yang layak menjadi penyelenggara negara, nasional ataupun daerah. Oleh karena itu suatu negara dapat dikatakan demokrasi, kalau di negara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas, adil, kompetitif dan berkala.

Pemilihan pejabat negara secara langsung oleh rakyat yang telah berlangsung berulang-ulang akan mengkondisikan setiap pejabat negara menjadi pelayan rakyat. Semakin banyak pejabat negara yang melayani rakyat, dan kebijakan publik semakin sesuai dengan aspirasi rakyat. Pejabat negara dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitan dengan pemenuhan janji dan komitmen yang diberikannya pada waktu kampanye (Panjaitan, 2013 : 134).

Masyarakat dalam Pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seharusnya memilih calon legislatif yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, karena jika figurnya salah maka perjuangan masyarakatpun akan salah. Selain memiliki prestasi, calon legislatif juga harus bersedia dikontrol saat berjanji supaya ketika terpilih nanti, calon legislatif tersebut bisa mengingat janji-janji itu bukan sekedar tertera yang ada pada baliho maupun di stiker. Pada tahun 2014 ini Indonesia memiliki kesempatan kembali memilih wakil rakyat baik

DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan Presiden dan wakil presiden tidak terkecuali di Provinsi Lampung khususnya Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Bandar Lampung tertuang dalam Surat KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 270.13/081/KPU.Kota.008.435642/I/2013 tanggal 18 maret 2013 perihal penyampaian daerah pemilihan, untuk Dapil 1 meliputi Kecamatan Kedaton, Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu dengan jumlah kursi 10 dengan jumlah penduduk untuk Kecamatan Kedaton 72.953 jiwa.

Sementara itu Panwaslu Kota Bandar Lampung tetap menerima adanya laporan atau sengketa terkait penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, walaupun secara keseluruhan proses berjalan lancar sesuai ketentuan undang-undang. Pada saat rekapitulasi pelaksanaan hasil penghitungan suara mulai dari TPS hingga Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD Kota Bandar Lampung menyisakan problematika pergeseran suara baik internal partai maupun eksternal partai.

Permasalahan yang muncul dalam proses pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat pemilih terutama pada calon pemilih yang berstatus pelajar maupun mahasiswa yang cenderung menjadi pemilih pasif bahkan *abstain* (tidak memilih) sesuai dengan hak pilih yang dimilikinya, yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Karakteristik Pemilih Berdasarkan tingkat pendidikan, suku bangsa, agama, dan pendapatan di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung**

<b>Pendidikan</b>	<b>Suku bangsa</b>	<b>Agama</b>	<b>Pendapatan</b>
Perguruan Tinggi: 1935 orang, yang terdiri dari: S1 = 1058 S2 = 875 S3 = 2	1. Lampung: 1928 orang 2. Jawa: 4789 orang 3. Padang: 874 orang 4. Batak: 325 orang 5. Sunda: 25 orang 6. Banten: 235 orang	1. Islam: 4928 orang 2. Katolik: 2189 orang 3. Kristen: 754 orang 4. Hindu: 215 orang 5. Budha: 90 orang 6. Konghucu: 0	1. < Rp 1.475.000: 4.582 orang 2. Rp 1.475.000: 3.594 orang

Sumber: Panwaslu Kota Bandar Lampung. 2013

Publikasi Statistik Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar para pemilih pemula adalah pekerja dan pengangguran terbuka. Jika mereka bukan angkatan kerja, maka mereka bersekolah atau mengurus rumah tangga. Dimensi lain yang diungkapkan publikasi *Statistik Indonesia* adalah partisipasi sekolah. Proporsi kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun yang masih sekolah lebih banyak di kota daripada di desa. Sebaliknya, kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun yang tidak sekolah lagi lebih banyak di desa daripada di kota. Proporsi penduduk berumur 15-19 dan 20-24 tahun, baik yang berdomisili di kota dan/atau desa, yang tidak bersekolah lagi lebih banyak daripada mereka yang masih sekolah. Para pemilih pemula mayoritas dihuni warga negara yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Karena proporsi penduduk berumur 15-19 dan 20-24 yang berdomisili di perdesaan lebih banyak daripada di kota, maka diperlukan *treatment* khusus untuk para pemilih pemula yang berdomisili di pedesaan.

Secara teoritik ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap seseorang dalam menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Menurut Adman Nursal (2004: 75) bahwa kualitas pemimpin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan memilih. Kebenaran pernyataan ini secara empirik dapat ditunjukkan oleh kemenangan Presiden SBY pada pilpres 2009 dimana SBY merupakan sebuah tokoh yang cukup dikenal (*Popular*) oleh masyarakat dan juga sebagai *incumbent* yang juga diusung oleh partai besar.

Kecenderungan perilaku pemilih ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh dalam Mukti (2011:2) menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Faktor-faktor tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat dalam pemilukada khususnya dikalangan pemilih yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya, sehingga faktor ini dapat menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih yang akan dibuktikan melalui penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengidentifikasi karakteristik pemilih yang dimana memetakan alasan mereka menentukan pilihan dan mengidentifikasi isu-isu yang terjadi pada basis pemilihan merupakan salah satu petunjuk penting untuk menentukan strategi, dengan mengidentifikasi karakteristik pemilihan khususnya pendidikan pemilih. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **Identifikasi Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Pada Pemilihan Anggota DPD Lampung Tahun 2014**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana identifikasi pendidikan masyarakat Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton pada Pemilihan Anggota DPD Lampung tahun 2014?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis identifikasi pendidikan masyarakat Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton pada Pemilihan Anggota DPD Lampung tahun 2014?.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menambah pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pendidikan masyarakat terhadap pemilihan Anggota DPD.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap Pemilihan pemilihan Anggota DPD.